



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

DPR sebagai Lembaga perwakilan politik memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah melalui kegiatan Persidangan. *"Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas". (kompasiana.com)*

Penyelenggaraan persidangan (rapat-rapat) merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Parlemen. Semua pengambilan keputusan parlemen pada dasarnya secara formal dilakukan dalam persidangan. Oleh sebab itu, akses menghadiri sidang-sidang (rapat) menjadi bagian dari asas keterbukaan dan kunci penting bagi partisipasi masyarakat. Sidang-sidang (rapat) DPR yang bersifat terbuka, menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan parlemen yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan Persidangan DPR dilaksanakan 5 (lima) kali Masa Sidang untuk 1 tahun dan dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan, yang salah satunya adalah Komisi.

Biro Persidangan I merupakan salah satu *supporting system* Dewan yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Persidangan I mengemban tugas untuk memberikan dukungan administrasi serta persidangan bagi DPR dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan persidangan di Komisi, melalui kegiatan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Kunjungan Kerja dan kegiatan persidangan paripurna dalam rangka pengambilan keputusan/persetujuan terhadap suatu Rancangan Undang-Undang atau Pejabat Publik.

Dalam memberikan dukungan administrasi dan persidangan bagi DPR, Biro Persidangan I melaksanakan penyiapan Skenario Rapat, Laporan Singkat, dan Risalah Rapat. Produk-produk persidangan DPR mencerminkan bahwa kebijakan,

keputusan dan program-program pembangunan telah dihasilkan DPR melalui pelaksanaan ketiga fungsi DPR.

Sebagai *supporting system*, Biro Persidangan I dituntut bekerja secara professional, modern dan akuntabel. Dalam upaya mewujudkan dukungan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Biro Persidangan I selalu melakukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya perbaikan dapat dilihat dari aspek capaian kinerja organisasi dan aspek akuntabilitas keuangan. Kedua aspek tersebut sangat penting karena seluruh program dan kegiatan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja lembaga.

Sebagai unit pendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Biro Persidangan I berkewajiban memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Persidangan I dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu Biro Persidangan I menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Persekjen Nomor 2 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Biro Persidangan I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna dalam mendukung tugas DPR RI untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sebagai salah satu unit yang berada dibawah Deputy Bidang Persidangan, dalam melaksanakan tugasnya, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan I;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan I.
- c. Perumusan dan evaluasi program rencana kegiatan dan anggaran Biro Persidangan I.
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Persidangan I.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan.
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro Persidangan I;
- g. Pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan XI dan persidangan paripurna;
- h. Pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan XI dan persidangan paripurna;
- i. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- j. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

## **2. Peran Strategis Biro Persidangan I**

Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya Biro Persidangan I memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan persidangan di komisi, Persidangan Paripurna dan penyusunan risalah persidangan DPR RI yang meliputi:

- a) Kegiatan DPR, yaitu :
  - 1) Pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna.
  - 2) Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan RUU;
  - 3) Pelaksanaan pembahasan anggaran mitra kerja Komisi;
  - 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan kebijakan Pemerintah;
  - 5) Pelaksanaan pemberian persetujuan / pertimbangan terhadap pejabat publik (*fit and proper test*);
  - 6) Pelaksanaan pengawasan terhadap kasus-kasus spesifik;

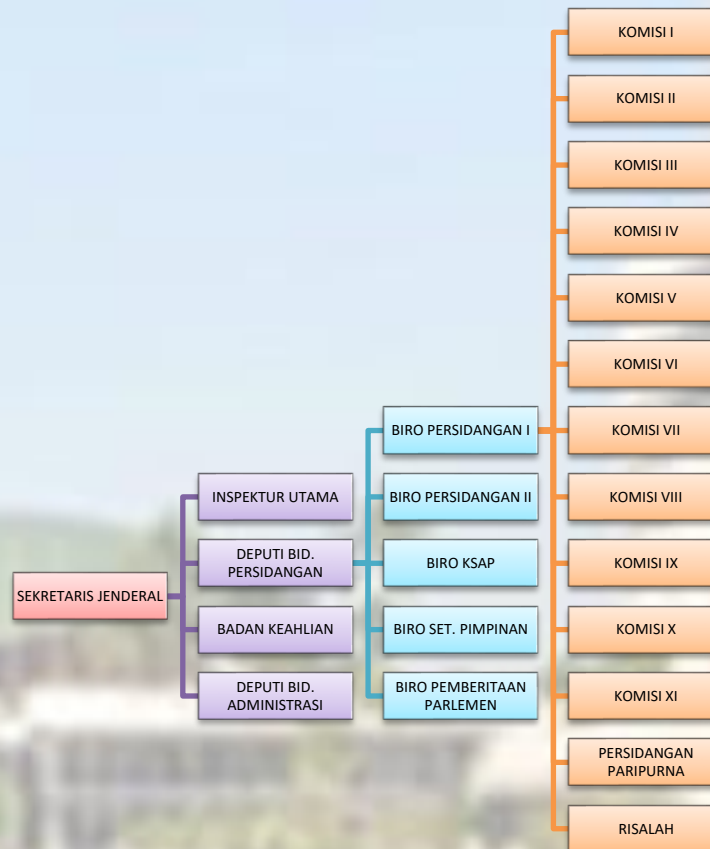
- b) Kegiatan Sekretariat Komisi, dan kegiatan Sekretariat Persidangan Paripurna, yaitu :
  - 1) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.
  - 2) Pelaksanaan penyiapan dukungan rapat dan tata usaha Sekretariat Komisi di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
  - 3) Pelaksanaan penyiapan dukungan rapat dan tata usaha persidangan Paripurna; dan
- c) Kegiatan Penyusunan risalah persidangan DPR RI

## **B. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Persidangan I memiliki struktu organisasi sebagai berikut :

- 1) Bagian Sekretariat Komisi I s.d. Sekretariat Komisi XI, mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi I s.d. XI.  
Bagian Sekretariat Komisi terdiri dari:
  - a. Subbagian Rapat
  - b. Subbagian Tata Usaha.
- 2) Bagian Persidangan Paripurna mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Persidangan Paripurna.  
Bagian Persidangan Paripurna terdiri dari:
  - a. Subbagian Rapat.
  - b. Subbagian Tata Usaha
- 3) Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyusunan Risalah persidangan DPR.

Struktur Organisasi Biro Persidangan I sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini.



### C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan administrasi dan persidangan DPR, Biro Persidangan I didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2020, Biro Persidangan I didukung oleh 159 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu :

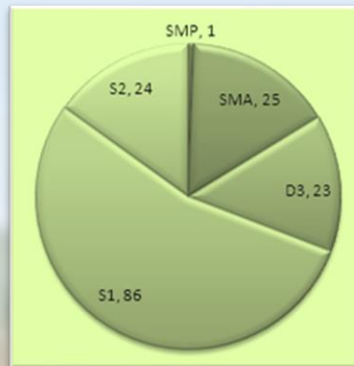
- |  |            |
|--|------------|
| 1. Kepala Biro Persidangan I                             | : 1 orang  |
| 2. Bagian Sekretariat Komisi I s.d Sekretariat Komisi XI | : 98 orang |
| 3. Bagian Persidangan Paripurna                          | : 6 orang  |
| 4. Bagian Risalah  | : 45 orang |
| 5. Perisalah Legislatif Ahli Madya (di bawah Biro sid I) | : 9 orang  |

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Persidangan I terdiri dari S2 berjumlah 24 orang, S1 berjumlah 86 orang, D3 berjumlah 23 orang, dan SLTA berjumlah 25 orang dan SLTP berjumlah 1 orang.

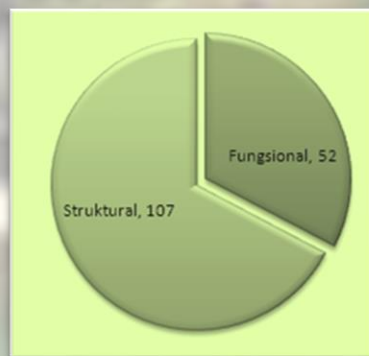
Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Persidangan I, terdiri dari pegawai struktural yang bertugas di Sekretariat Komisi, Sekretariat persidangan

Pariपुरna dan Bagian Risalah, juga didukung oleh Jabatan Fungsional tertentu yaitu Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

#### Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I berdasar Pendidikan



#### Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I berdasar Jabatan (Struktural dan Fungsional)



#### D. POTENSI DAN TANTANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan dukungan administrasi dan persidangan DPR, Biro Persidangan I memiliki potensi dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Potensi dukungan Sumber Daya Manusia memberikan dukungan yang signifikan terhadap proses pelaksanaan persidangan DPR di Komisi, Persidangan Pariपुरna dan penyusunan risalah persidangan. Jumlah SDM yang ada dirasakan masih jauh dari kebutuhan SDM ideal untuk mendukung kegiatan persidangan DPR. Untuk itu, Biro Persidangan I perlu didukung dengan penambahan jumlah SDM dalam memberikan dukungan persidangan DPR, dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan yang diperlukan.

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga memberikan potensi dan tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana berupa Teknologi Informasi sangat menunjang dalam memberikan dukungan persidangan. Akses informasi yang cepat sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana teknologi informasi yang tersedia. Melalui teknologi informasi, maka peran-peran Anggota DPR didalam persidangan, hasil-hasil persidangan, maupun berbagai informasi publik lainnya merupakan dasar bagi transparansi parlemen yang lebih luas. Dengan akses yang baik serta tersedianya teknologi informasi yang diperlukan, masyarakat dapat mengetahui proses pembuatan undang-undang serta pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil peran dan posisi yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan dan keputusan yang dihasilkan DPR benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus akan memperkuat eksistensi dan legitimasi Anggota DPR, karena masyarakat dapat mengetahui aktivitas, program ataupun inisiatif anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LAKIP Biro Persidangan I Tahun 2019 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **a. Capaian Kinerja**

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

#### **b. Evaluasi Capaian Kinerja**

c. Akuntabilitas Keuangan

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Daftar Tabel
- 2) Lain -lain



**BAB II**

---

**PERJANJIAN KINERJA**



## A. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada.

Sebagai unit yang berada di bawah Deputy Persidangan, di dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan, terdapat 2 (dua) sasaran yang memuat 3 (tiga) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Pencantuman Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Persidangan Tahun 2020 dalam laporan ini sangat dibutuhkan untuk melihat keselarasan antara PK Deputy Bidang Persidangan dan PK Biro Persidangan I.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan	3,20
2.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB
		Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	B

## B. PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN I TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Persidangan I untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I

Tahun 2020 terdiri atas 1 (satu) sasaran program, yang memuat 4 (empat) indikator kinerja utama. Indikator kinerja Biro Persidangan I selaras dengan indikator kinerja Deputi Bidang Persidangan.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah</b>	Persentase Skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %
		Persentase Skenario dan Risalah Rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %
		Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,30
		Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan I	90%

*Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2020*

### C. ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Biro Persidangan I dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI tahun 2020. Alokasi anggaran (revisi) Biro Persidangan I pada tahun 2020 sebesar Rp.7.163.788.000,-. Anggaran tersebut mengalami optimalisasi dibanding DIPA (awal) sebesar Rp.8.599.582.000,-.

### D. METODE PENGHITUNGAN

Metode Penghitungan:

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja "Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi I - XI. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat skenario dan laporan singkat

persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terselesaikannya skenario dan risalah rapat pada rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Anggota DPR. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan. Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman pada PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

#### **Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan**

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

4. Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan I

Penghitungan kinerja “Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan I” dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap DIPA (revisi).



**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dengan target hasil capaian selama satu tahun.

Pada tahun 2020, penetapan indikator kinerja telah berorientasi pada *outcome*. Hal ini sejalan dengan masukan/arahan dari KemenPAN & RB, bahwa kinerja dari unit Eselon II harus memberikan impact bagi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Jenderal DPR RI serta tujuannya dalam rangka memberikan dukungan pelayanan yang prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan termasuk di dalamnya dukungan administrasi dan persidangan maka Biro Persidangan I pada Tahun 2020 telah menetapkan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah dengan 4 indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi/Capaian Tahun 2020**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN	
<b>Satker Sekjen</b>				
<b>Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah</b>	1	Persentase Skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100 %
	2	Persentase Skenario dan Risalah Rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100 %
	3	Indeks kepuasan Anggota atas layanan persidangan	3,30	3,30
	4	Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan	90 %	97,16 %

Selanjutnya dalam menjalankan fungsi koordinasi, Biro Persidangan I mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan

Biro Persidangan I. Pada Tahun 2020 Biro Persidangan I mampu menyelesaikan semua indikator kerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tingkat capaian kinerja dari tujuan strategis yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama Biro Persidangan I serta realisasi dari indikator kinerja Biro Persidangan I pada Tahun Anggaran 2020, baik realisasi pelaksanaan program maupun realisasi anggaran berdasarkan tabel Capaian Kinerja Biro Persidangan dapat dijelaskan dibawah ini.

### 1. Analisis Capaian Jumlah Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk tiap sasaran program dan indikator kinerja, sebagai berikut:

1	Sasaran rogram	IKU	Target	Realisasi
	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase Skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100%

**Tabel 3.2.**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Jumlah Skenario dan laporan Singkat Persidangan Komisi I - XI**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
	TARGET	CAPAAN	
Jumlah Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I - XI:			
1. Jumlah skenario dan lapsing Persidangan Komisi I	100 %	100 %	
2. Jumlah skenario dan lapsing Persidangan Komisi II	100 %	100 %	
3. Jumlah skenario dan lapsing Persidangan Komisi III	100 %	100 %	
4. Jumlah skenario dan lapsing Persidangan Komisi IV	100 %	100 %	
5. Jumlah skenario dan lapsing Persidangan Komisi V	100 %	100 %	

6.	Jumlah skenario dan lapping Persidangan Komisi VI	100 %	100 %	
7.	Jumlah skenario dan lapping Persidangan Komisi VII	100 %	100 %	
8.	Jumlah skenario dan lapping Persidangan Komisi VIII	100 %	100 %	
9.	Jumlah skenario dan lapping Persidangan Komisi IX	100 %	100 %	
10.	Jumlah skenario dan lapping Persidangan Komisi X	100 %	100 %	
11.	Jumlah skenario dan lapping Persidangan Komisi XI	100 %	100 %	

Berdasarkan Tabel 3.2. di atas, bahwa pencapaian jumlah skenario dan lapping persidangan Komisi I - XI dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah mencapai 100 %, yang meliputi skenario dan Lapping Komisi I - XI pada Masa Persidangan II - IV Tahun 2019 - 2020 dan Masa Persidangan I - II Tahun 2020 - 2021, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen per masa sidang untuk pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran.

Perencanaan tersebut sejalan dengan Agenda DPR RI yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR pada setiap awal masa sidang (*Pasal 51 huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa Badan Musyawarah bertugas menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya*)

Dalam mendukung kegiatan Dewan melaksanakan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan, Biro Persidangan I menyiapkan beberapa dokumen materi persidangan di Komisi yang meliputi:

#### 1) Skenario rapat

Skenario rapat adalah suatu kertas kerja yang dipergunakan sebagai acuan Pimpinan Rapat pada pelaksanaan rapat, yang berisikan informasi antara lain penyampaian jenis rapat, sifat rapat, kuorum rapat, tema rapat

dan poin-poin yang terkait dengan tema yang akan dibahas sebagai gambaran awal bagi peserta rapat dan informasi pendukung lainnya jika diperlukan.

Skenario rapat digunakan sebagai panduan bagi Pimpinan Rapat untuk memimpin dan mengendalikan rapat, agar rapat berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran, serta tidak menyimpang dari substansi yang tengah dibahas.

*Output* : Tersedianya skenario rapat sebelum rapat dimulai yang disesuaikan dengan materi pembahasan dan peraturan perundang-undangan.

*Outcome* : Rapat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan materi rapat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memperlancar proses pengambilan keputusan.

## 2) Laporan singkat rapat

*Laporan singkat adalah Laporan yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat (Pasal 303 ayat (3) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib)*

*Output* : Tersedianya laporan singkat yang memuat gambaran singkat proses pelaksanaan rapat dan kesimpulan dan/atau keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.

*Outcome* : Laporan singkat hasil rapat dapat menjadi bahan dan informasi bagi Anggota DPR serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk melakukan tindak lanjut hasil keputusan.

Adapun pelaksanaan Rapat-Rapat Komisi I - XI pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut ini :

RAPAT-RAPAT FUNGSI LEGISLASI													
NO	MASA SIDANG	KOMISI											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	



1	MS II	8	0	1	0	3	4	10	1	0	0	0
2	MS III	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
3	MS IV	5	10	0	2	5	0	1	0	0	4	0
4	MS I	6	6	9	0	5	2	5	10	9	7	6
5	MS II	3	0	0	0	0	1	2	6	0	10	0

#### RAPAT-RAPAT FUNGSI ANGGARAN

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS II	0	0	0	9	0	0	0	15	0	9	0
2	MS III	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0
3	MS IV	8	6	5	6	4	18	13	8	21	12	6
4	MS I	23	12	7	14	18	21	13	17	21	19	14
5	MS II	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11

#### RAPAT-RAPAT FUNGSI PENGAWASAN

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS II	16	23	21	19	33	37	21	22	23	30	34
2	MS III	14	6	4	15	8	28	6	10	13	25	21
3	MS IV	19	4	12	11	10	6	14	10	4	23	20
4	MS I	10	5	6	9	9	12	16	11	9	14	18
5	MS II	4	13	2	11	18	8	12	5	10	15	13

## 2. Analisis Capaian Jumlah Skenario dan Risalah Rapat di Sidang Paripurna

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk tiap sasaran program dan indikator kinerja, sebagai berikut:

2	Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi
	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase Skenario dan Risalah Rapat persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100%

Sesuai Pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Penjadwalan Rapat Paripurna ditentukan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR mengingat Badan Musyawarah bertugas menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah dan jangka waktu penyelesaian RUU dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPR untuk mengubahnya (Pasal 51 huruf a Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI).

Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir dan undangan yang hadir. (Pasal 301 ayat (2) Peraturan DPR RI nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib).

Pada tahun 2020, target Skenario dan Risalah Rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI adalah 100 % dalam 5 masa sidang yaitu Masa Persidangan II - IV Tahun 2019 - 2020 dan Masa Persidangan I - II tahun 2020 -2021 dan capaian persentase Skenario dan Risalah Rapat persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI telah terpenuhi sebesar 100 %.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Jumlah Skenario dan Risalah Rapat Paripurna DPR Tahun 2020**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	
	TARGET	CAPAIAN
Jumlah Skenario dan Risalah Rapat Paripurna	100 %	100 %

Adapun kegiatan Rapat-Rapat Paripurna tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Tabel Rekapitulasi Penyelenggaraan Rapat Paripurna Tahun 2020**

LAPORAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA DPR RI SELAMA TAHUN 2020		
NO	RAPAT PARIPURNA	AGENDA RAPAT PARIPURNA
1.	Rapat paripurna ke - 7 masa persidangan II tahun sidang	Pidato pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2019-2020

	2019-2020 ( Senin, 13 Januari 2020 )	
2.	Rapat paripurna ke - 8 masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 ( Rabu, 22 Januari 2020 )	Penetapan prolegnas RUU prioritas tahun 2020 ( didahului pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI sisa masa jabatan 2019-2024
3.	Rapat paripurna ke - 9 masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 ( Senin, 3 Februari 2020 )	Laporan komisi III DPR RI tentang uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> mahkamah agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
4.	Rapat paripurna ke - 10 masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 ( Kamis, 6 Februari 2020 )	Laporan komisi VI DPR RI terhadap pembicraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap ruu tentang pengesahan persetujuan kemiteraan ekonomi komprehensif Indonesia-australia ( <i>Indonesia-australia comprehensive economic partnership agreement, IA-CEPA</i> )
5.	Rapat paripurna ke - 11 masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 ( Kamis, 27 Februari 2020 )	1. Laporan komisi II DPR RI terhadap penggantian calon anggota komisi pemilihan umum RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan 2. Pidato pimpinan DPR RI pada penutupan masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 ( didahului pelantikan anggota antar waktu DPR RI)
6.	Rapat paripurna ke - 12 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 ( Senin, 30 Maret 2020 )	1. Pidato ketua DPR RI pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 2. Laporan komisi XI DPR RI mengenai hasil <i>fit and proper test</i> terhadap 3 (tiga) kantor akuntan public (KAP) yang diajukan oleh 3. badan pemeriksa keuangan,dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
7.	Rapat Paripurna ke - 13 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 ( Kamis, 2 April 2020 )	1. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU perubahan ketiga atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi ruu usul DPR RI 2. Pendapat fraksi-fraksi terhadap ruu perubahan atas uu nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi Ruu usul DPR RI 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan DPR RI tentang tata tertib dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap rancangan peraturan DPR RI tentang pembentukan undang undang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 5. Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU tentang kitab undnag undnag hukum pidana; 6. Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan ; 7. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap perubahan jadwal penyampaian kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok kebijakan fiscal RAPBN ta 2021
8.	Rapat Paripurna ke - 14 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 ( Selasa, 5 Mei 2020 )	1. Penyampaian Ikhtisari Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode semester II tahun 2019; 2. Laporan Badan Legislasi terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang tata tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan ; 3. Laporan BURT terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2021
9.	Rapat Paripurna ke - 15 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020	1. Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok kebijakan fiscal RAPBN

	( Selasa 12 Mei 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap rancangan undang undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 atau covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang.</li> <li>3. Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.</li> <li>4. Pendapat fraksi-fraksi atas usul inisiatif komisi VIII terhadap ruu tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU atas usul DPR RI</li> <li>5. Pendapat fraksi-fraksi atas usul inisiatif badan legislasi terhadap rancangan undang undang tentang haluan ideology pancasila, dilanjutkan dengan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.</li> <li>6. Pidato ketua DPR RI penutupan masa sidang III tahun sidang 2019-2020.</li> </ol>
10.	Rapat Paripurna ke - 16 masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020 ( Senin, 15 Juni 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidato ketua DPR RI pembukaan masa persidangan ke VI tahun sidang 2019-2020.</li> <li>2. Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2021</li> </ol>
11.	Rapat Paripurna ke - 17 masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020 ( Kamis, 18 Juni 2020 )	Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021
12.	Rapat Paripurna ke - 18 masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020 ( Selasa, 14 Juli 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019.</li> <li>2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.</li> <li>3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undnag No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.</li> <li>4. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap Ruu Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbale Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republic Indonesia Dan Konfederasi Swiss (<i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation</i>).</li> <li>5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Pengesahana Persetujaun Antara Pemerintah Republic dan Cabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>).</li> <li>6. Laporan Komisi XI Terhadap Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023</li> </ol>

13.	Rapat Paripurna ke - 19 masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020 ( Kamis, 16 Juli 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan komisi XI atas hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon deputy gubernur bank Indonesia periode 2020-2025.</li> <li>2. laporan komisi VI DPR RI atas penetapan pemberian pertimbangan terhadap calon anggota badan perlindungan konsumen nasional (BPKN) periode 2020-2023.</li> <li>3. penyampaian rancangan undang undang tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2019 oleh pemerintah.</li> <li>4. Laporan Badan Legislasi atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (prolegnas) RUU Prioritas tahun 2020,dilanjutkan pengambilan keputusan.</li> <li>5. Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020</li> </ol>
14.	Rapat Paripurna ke - 1 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Jum'at, 14 Agustus 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pidato ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2020-2021.</li> <li>2. Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya</li> </ol>
15.	Sidang bersama MPR RI,DPR RI dan DPD RI. Masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Jum'at, 14 Agustus 2020 )	Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republic Indonesia Tahun 2020
16.	Rapat Paripurna ke - 2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Selasa, 18 Agustus 2020 )	Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.
17.	Rapat Paripurna ke - 3 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Selasa, 25 Agustus 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;</li> <li>2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya.</li> </ol>
18.	Rapat Paripurna ke - 4 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Selasa, 1 September 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya.</li> <li>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .</li> </ol>
19.	Rapat Paripurna ke - 5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Selasa, 15 September 2020 )	Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) Tahun Anggaran 2019
20.	Rapat Paripurna ke - 6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 ( Selasa, 29 September 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021</li> <li>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Tentang Bea Materai.</li> <li>3. Perpanjangan Waktu Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.</li> </ol>
21.	Rapat Paripurna ke - 7 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembicaraan tingkat I/pengambilan keputusan rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan RI-Swedia tentang kerja</li> </ol>

	( Senin, 5 Oktober 2020 )	<p>sama petahanan (<i>Agreement Between the Government of The Kingdom Sweden Concerning Cooperation in The Field of the Defence</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Tentang Protocol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Sama Asean di Bidang Jasa Keuangan/ Afas (<i>Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitment On Financial Service Under The Asean Framework Agreement On Service</i>)</li> <li>3. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap R UU Usul Anggota Tentang Praktik Psikologi</li> <li>4. Pengumuman tentang Pewarganegaraan terhadap Sdr. Brandon Van Dorn Jawato, Sdr.Lester Proper, Sdr Kimberly pierre Louis, Sdr. Marc Anthony Klok</li> <li>5. penyampaian hasil pertimbangan anggota baznaz dilanjutkan dengan pengambilan keputusan</li> <li>6. pembicaraan Tk.II/pengambilan keputusan RUU tentang cipta kerja</li> <li>7. pidato ketua DPR RI pada penutupan masa sidang I tahun sidang 2020-2021</li> </ol>
22.	Rapat Paripurna ke - 8 masa persidangan II tahun sidang 2020-2021 ( Senin, 9 November 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021</li> <li>2. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 Serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2020 oleh BPK RI</li> </ol>
23.	Rapat Paripurna ke - 9 masa persidangan II tahun sidang 2020-2021 ( Senin, 7 Desember 2020 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan komisi VII DPR RI atas hasil uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap calon anggota dewan energy nasional (DEN) dari pemangku kepentingan periode 2020-2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan</li> <li>2. laporan komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap calon anggota yudisial masa jabatan tahun 2020-2025,dilanjutkan dengan pengambilan keputusan</li> <li>3. laporan komisi V DPR RI atas hasil uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap calon anggota pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) periode 2021-2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan</li> <li>4. pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif anggota komisi V DPR RI tentang perubahan atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI</li> <li>5. permohonan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang pelindung data pribadi</li> <li>6. penetapan keanggotaan pansus rancangan undang-undang tentang landas kontinen.</li> </ol>
24.	Rapat Paripurna ke - 10 masa persidangan II tahun sidang 2020-2021 ( Jum'at, 11 Desember 2020 )	Pidato penutupan masa persidangan II tahun sidang 2020-2021

### 3. Analisis capaian terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap DPR RI

3	Sasaran rogram	IKU	Target	Realisasi
	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Indeks kepuasan Anggota atas layanan persidangan	3,30	3,30

Capaian Indeks kepuasan pengguna terhadap dukungan Sekretariat Jenderal DPR diukur dari pelaksanaan survey. Survei tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permen PAN & RB No.14 Tahun 2017). Kegiatan survei tersebut telah dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2020. Survei ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap dukungan yang telah diberikan Setjen DPR kepada Anggota DPR periode 2019 - 2024.

Survei melibatkan 231 orang Anggota DPR RI yang terdiri dari 9 fraksi (tabel daftar responden) Jumlah tersebut masih dalam batas *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95% sesuai dengan Permen PAN & RB No.14 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*. Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahun 2020 ini, survei dilakukan dengan menggunakan media digital yaitu *Google Form* dan isian manual karena pandemi COVID-19. Tabel di bawah ini adalah daftar responden pada survey tersebut.

**Tabel Daftar Responden**

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	128	51
2	Fraksi Partai Golkar	85	34
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	31
4	Fraksi Partai Nasdem	59	24
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	23
6	Fraksi Partai Demokrat	54	22
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	20
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	18
9	Partai Partai Persatuan Pembangunan	19	8
	<b>Jumlah</b>	<b>575</b>	<b>231</b>

Berdasarkan hasil survei, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan sebesar 3,30, sama dengan yang ditetapkan sebesar 3,30. Namun hasil tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 3,33 (tabel rentang nilai mutu pelayanan). Tahun 2020 merupakan tahun pertama dilakukannya survei kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan untuk periode keanggotaan 2019-2024 sehingga dalam penyusunan target, hampir sama dengan hasil tahun 2019. Penurunan indeks kepuasan tersebut diduga sebagai dampak pandemic COVID-19 sehingga pelayanan terhadap Anggota DPR RI menjadi kurang maksimal. Beberapa pegawai di lingkungan Biro Persidangan I menjadi *suspect* COVID-19.

**Tabel Perbandingan Hasil Survei Tahun 2019-2020**



No	Sasaran/Indikator	Hasil Survei 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,33	3,30	3,30

Namun, indeks kepuasan tersebut berada di atas indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan dan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan sebesar 3,279 dan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI sebesar 3,270. Hasil tersebut menggambarkan bahwa indeks kepuasan atas Layanan Persidangan di atas rata-rata Deputi Bidang Persidangan dan Setjen DPR RI.

**Tabel Perbandingan Hasil Survei Dibanding Deputi Bidang Persidangan dan Setjen DPR RI**

No	Sasaran/Indikator	Persidangan I	Deputi Bid. Persidangan	Setjen DPR RI
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI	3,30	3,28	3,27

#### 4. Analisis capaian persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan I

4	Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi
	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase penyerapan Anggaran Biro Persidangan	90 %	97,16%

Biro Persidangan I pada tahun 2020 mengelola pagu anggaran sebesar Rp.7.163.788.000. Pada tahun 2020, Biro Persidangan I dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Persidangan I sebesar Rp6.960.002.248,- atau 97,16% dari pagu.

Dengan pencapaian tersebut, maka indikator kinerja keempat Biro Persidangan I, yaitu persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan I dengan target 90% telah dapat tercapai 100 %.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2020, Biro Persidangan I mengelola anggaran sebesar **Rp8.309.182.000,-**. Berkenaan dengan adanya pandemic Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Refocusing pada Anggaran Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal DPR juga mengalami Refocusing Anggaran Tahun 2020 untuk semua unit, dan Biro Persidangan I juga mengalami Refocusing anggaran sebesar Rp1.145.394.000, dengan demikian Anggaran Biro Persidangan I menjadi sebesar **Rp7.163.788.000** dan realisasinya sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp6.960.002.248,- atau 97,16% (table 3.6)

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	CAPAIAN	
			REALISASI	%
	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	7.163.788.000,-	6.960.002.248	<b>97,16%</b>

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran Biro Persidangan I Tahun 2020

Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibanding realisasi Deputi Bidang Persidangan, namun masih lebih rendah dibanding realisasi Setjen DPR RI. Realisasi anggaran Deputi Bidang Persidangan sebesar 95,04% dan realisasi anggaran Setjen DPR RI sebesar 97,45% (table 3.7)

**Tabel 3.6**  
**Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020**

No	Uraian	Persidangan	Deputi Bid. Persidangan	Setjen DPR RI
	Realisasi Anggaran	97,16%	95,04%	97,45%

Di lingkup internal Biro Persidangan I, terdapat 8 (delapan) unit kerja dengan realisasi sebesar 100% yaitu Bagian Sekretariat Komisi I, Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI. Adapun realisasi unit kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Biro Persidangan I sangat bagus, di atas realisasi Biro Persidangan I secara umum. Kendala realisasi anggaran berada di bawah pengelolaan Biro. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terserap secara optimal yaitu kegiatan rapat, mengundang narasumber, dan perjalanan dinas. Kegiatan-kegiatan tersebut terkendala adanya pandemi COVID-19. Semula akan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*), namun harus dilaksanakan secara daring/virtual sehingga ada beberapa pos anggaran yang tidak dapat direalisasikan.



## **BAB IV** **PENUTUP**

Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Persidangan I beserta jajarannya dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro Persidangan I Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, meski dalam kondisi pandemi tetap menghasilkan outcome dan output yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Di masa yang akan datang kinerja yang telah dihasilkan akan terus ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan kepada anggota DPR RI yang semakin tinggi dan sesuai dengan salah satu tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024 yaitu terwujudnya dukungan persidangan dan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Biro Persidangan I selalu berupaya melaksanakan kinerja secara optimal dan terus melakukan upaya perbaikan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Persidangan I yang telah bekerja sebaik mungkin, pada tahun 2020 Biro Persidangan I telah mampu menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, hal ini tercermin pada pencapaian seluruh indikator kinerja.

Tahun 2020 ini, Biro Persidangan I mampu mencapai target terkait dengan persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI, persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan, dan persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan I.

Untuk itu pada tahun mendatang, Biro Persidangan I diharapkan dapat terus memberikan dukungan layanan persidangan dan risalah bagi kegiatan DPR RI dalam menjalankan fungsinya, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran.

Jakarta, Februari 2021  
Kepala Biro Persidangan I,

Suprihartini, Sip, MSi  
NIP.197101061990032001